

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Identifikasi Masalah

Permasalahan kemiskinan merupakan permasalahan utama yang menjadi pusat perhatian pemerintahan suatu negara atau daerah. Status kemiskinan suatu negara atau wilayah menggambarkan kesejahteraan penduduknya. Semakin banyak masyarakat miskin pada setiap daerah maka tidak sejahtera daerah tersebut dan semakin sedikit persentase masyarakat miskin, menunjukkan kesejahteraan penduduknya (Wigawati, 2018).

Pembangunan Menurut Badan Pusat Statistik, kemiskinan di Indonesia menyebar pada 34 Provinsi di Indonesia, pada umumnya angka kemiskinan masih besar pada wilayah tertentu. Masalah kemiskinan di setiap wilayah berbeda-beda, sehingga penyelesaian dalam permasalahan kemiskinan di setiap daerah juga akan berbeda-beda, untuk itu perlu dicari solusi dalam menyelesaikan permasalahan penyebab kemiskinan di setiap daerah. Adapun wilayah yang masih menghadapi persoalan kemiskinan adalah Pulau Sumatera. Untuk persentase penduduk miskin di Sumatera tahun 2019 tertinggi yaitu berada pada Provinsi Aceh sebesar 15,32% sedangkan untuk persentase penduduk miskin terendah yaitu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 4,2% (Sinaga, 2020).

Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, harus diketahui faktor yang menyebabkan kemiskinan. Adapun cara untuk mengetahui faktor-faktor kemiskinan adalah menggunakan model regresi. Aspek kemiskinan kemungkinan besar berpengaruh terhadap aspek lokasi. Ukuran kriteria masyarakat miskin yang berbeda dapat mempengaruhi kebijakan yang diberikan kepada daerahnya. Analisis model regresi sangat penting dalam mengidentifikasi faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan yang dipengaruhi oleh karakteristik daerah. Semua sesuatu saling berhubungan satu sama lain, tetapi sesuatu yang dekat memberikan pengaruh lebih dibandingkan sesuatu yang jauh. Adanya pengaruh spasial sering kali terjadi antara satu daerah dengan daerah lainnya (Tambunan, 2019).

Dalam beberapa kasus, terkait dengan hasil penelitian pada daerah yang berbeda, terutama daerah yang bertetangga maka dibutuhkan model regresi dengan menggunakan pengaruh spasial antar daerah pada model tersebut. Dengan informasi pengaruh spasial antar daerah diperlukan keberadaan keragaman spasial pada model, oleh karena itu pada penelitian ini menentukan kemiskinan disuatu wilayah dengan melihat pengaruh spasial diwilayah lain.

Untuk melihat pengaruh spasial di Sumatera maka dapat dilihat dari faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera, adapun faktor yang mempengaruhi angka kemiskinan di Sumatera seperti: pertumbuhan ekonomi, indeks kemahalan konstruksi dan indeks pembangunan manusia. Kualitas SDM dijadikan faktor penyebab timbulnya masalah kemiskinan di setiap wilayah, kualitas SDM diukur melalui Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Manusia yaitu indikator yang memaparkan seberapa sanggup masyarakat mampu mengakses hasil pembangunan dari sisi pendapatan, kesehatan dan pendidikan. Berdasarkan BPS (2019), IPM membentuk tiga indikator utama seperti umur panjang, pola hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak. IPM yang rendah mengakibatkan rendahnya produktivitas tenaga kerja masyarakat, produktivitas yang rendah akan mengakibatkan penghasilan yang rendah, sehingga penghasilan yang rendah mengakibatkan banyaknya jumlah penduduk miskin (Sukmaraga, 2011).

Berdasarkan studi kasus penelitian dengan mengamati pertumbuhan dan perkembangan kualitas SDM di Sumatera diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2019. IPM tertinggi tahun 2019 berada pada Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 75,48% kemudian disusul oleh Provinsi Riau sebesar 73% dan Provinsi Sumatera Barat sebesar 72,39%. Sedangkan untuk IPM terendah berada pada Provinsi Lampung sebesar 69,57%. Indeks pembangunan manusia untuk mengukur kesejahteraan masyarakat, dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan pemerataan pendapatan.

Suatu negara dinilai sejahtera diukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi menjadi indikator keberhasilan dalam pembangunan. Adapun tujuan terpenting dari suatu pembangunan dengan pengurangan angka kemiskinan yang dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Menurut Wiguna (2013), pada suatu proses pertumbuhan ekonomi adapun indikator yang dipakai dalam melihat adanya gejala pertumbuhan ekonomi disuatu negara atau daerah dengan memakai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Melalui PDRB, dapat dilihat dari aktivitas perekonomian yang sudah dilakukan serta diperoleh oleh suatu negara atau wilayah dalam waktu tertentu (Adam, 2018).

Berdasarkan BPS memperlihatkan bahwa untuk laju pertumbuhan PDRB ADHK tertinggi pada tahun 2019 adalah Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebesar 5,71% kemudian disusul oleh Provinsi Lampung sebesar 5,27% dan selanjutnya Provinsi Sumatera Utara sebesar 5,22%. Sedangkan untuk laju pertumbuhan PDRB ADHK terendah berada pada Provinsi Riau sebesar 2,84%. Angka PDRB yang tinggi akan menggambarkan tingginya perekonomian pada

suatu wilayah. Perekonomian suatu wilayah juga dapat dilihat dari Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) wilayah tersebut.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 menjelaskan tentang Indeks Kemahalan Konstruksi yaitu suatu variabel yang dipakai untuk menghitung dana perimbangan Dana Alokasi Umum. Pada rumusan penghitungan DAU, IKK dijadikan proksi dalam memperlihatkan tingkat kesulitan geografis setiap wilayah, sehingga semakin sulit letak geografis wilayah maka semakin tinggi angka IKK-nya. IKK yang tinggi berarti menandakan buruknya kondisi infrastruktur di wilayah tersebut, sehingga infrastruktur yang buruk berdampak pada aksesibilitas wilayah tersebut sulit dan mobilitas menjadi rendah yang berpengaruh pada kegiatan perekonomian.

Dalam Publikasi BPS dapat diketahui bahwa indeks kemahalan konstruksi tertinggi pada tahun 2019 adalah Provinsi Kepulauan Riau yaitu sebesar 128,34% kemudian disusul oleh Sumatera Utara sebesar 102,79% dan selanjutnya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar 101,27%. Sedangkan untuk indeks kemahalan konstruksi terendah berada pada Provinsi Riau sebesar 88,84%.

Dari uraian permasalahan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi dan Indeks Kemahalan Konstruksi terhadap Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera.

1.2 Perumusan Masalah

Perbedaan angka kemiskinan di suatu daerah disebabkan karena perbedaan karakteristik antar daerah. Seiring dengan perbedaan tersebut menimbulkan pengaruh atau keterkaitan antar daerah. Adanya kedekatan geografis atau spasial dapat menyebabkan terjadinya transfer pengetahuan, penyebaran informasi dan kebijakan yang ditetapkan pada setiap daerah sehingga berdampak pada wilayah lain di sekitarnya. Dengan demikian, kesamaan tingkat kemiskinan di wilayah yang berdekatan secara geografis memiliki efek spasial antara satu daerah terhadap daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan di suatu wilayah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor khusus daerah tersebut, tetapi juga oleh kemiskinan di daerah lain (Pandu, 2016). Oleh karena itu, peneliti mengangkat rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- 1) Apakah Indeks Pembangunan Manusia mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan menurut kabupaten/kota di Sumatera?
- 2) Apakah Pertumbuhan Ekonomi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan menurut kabupaten/kota di Sumatera?

- 3) Apakah Indeks Kemahalan Konstruksi mempunyai pengaruh terhadap kemiskinan menurut kabupaten/kota di Sumatera?
- 4) Bagaimanakah efek spasial terhadap tingkat kemiskinan menurut kabupaten/kota di Sumatera?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan menurut kabupaten/kota di Sumatera.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap kemiskinan menurut kabupaten/kota di Sumatera.
- 3) Untuk menganalisis pengaruh Indeks Kemahalan Konstruksi terhadap kemiskinan menurut kabupaten/kota di Sumatera.
- 4) Untuk menganalisis efek spasial terhadap tingkat kemiskinan menurut kabupaten/kota di Sumatera.

